Newsletter
Pusdatin

Volume 18 No. 11, Edisi November 2021 ISSN : 1411-9196

Daftar Isi

Mentan SYL Ajak Jajarannya Hidupkan Semangat Kepahlawanan
Halaman 1

Mentan SYL Pimpin Sidang Menteri Pertanian ASEAN, Pastikan Ketahanan Pangan Regional
Halaman 3

Cegah Seragan Digital, Kementan dan BSSN Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber
Halaman 5

Kementan-Kejagung Kolaborasi Pastikan Bantuan Alsintan Termanfaatkan Genjot Produksi dan Kesejahteraan Petani
Halaman 7

Updating Luas Baku Lahan Sawah Sebagai Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta
Halaman 8

Info Data Pertanian
Halaman 12

Scan QR Code

atau akses link
pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Mentan SYL Ajak Jajarannya Hidupkan Semangat Kepahlawanan

Dhanang

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 November 2021. Hadir sebagai pembina upacara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak jajarannya untuk bisa menghidupkan semangat kepahlawanan nasional.

"Mari kita hidupkan semangat kepahlawanan di dalam kehidupan kita. Makna hari pahlawan itu adalah menghadirkan empati nasional, yaitu empati terhadap bangsa ini dan empati kepada pahlawan kita. Menghidupkan semangat kepahlawanan berarti mengucapkan kepada para pahlawan terdahulu bahwa kamu tidak mati sekarang ini karena ada aku yang meneruskan cita-citamu," ungkap SYL, disambut tepuk tangan para peserta upacara.

SYL menyebutkan semua pelaku pembangunan pertanian memiliki potensi untuk menjadi pahlawan bangsa, termasuk jajaran Kementan.

“Hari (pahlawan.red) ini kita peringati bukan hanya soal pertempuran. Pahlawan bukan hanya mereka yang mengangkat senjata bela negara. Pahlawan ada pada diri kawan-kawan semua yang turut memastikan kebutuhan pangan 273 orang rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Menurut SYL, pertanian merupakan sektor krusial. Terutama di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah sangat penting untuk hadir memfasilitasi penyediaan dan distribusi pangan.

“Di masa pandemi, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Bayangkan dalam kondisi masyarakat tidak boleh keluar rumah, kita harus memikirkan bagaimana makan mereka? Kalau kita kemarin tidak bergerak cepat, bisa banyak yang mati kelaparan. Kalau pertanian kita tidak bagus, apa anak-anak kita bisa sekolah dengan baik?” tutur SYL.

Untuk itu, SYL menyampaikan penghargaan kepada jajarannya atas kerja keras mereka dalam upaya mereka memastikan roda pembangunan pertanian untuk terus bergerak.

“Saya berterima kasih kepada Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan semua jajaran Kementan, dari atas hingga bawah yang telah bekerja dan berkontribusi dalam penyediaan pangan,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, SYL pun mengajak jajarannya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Apalagi saat ini teknologi dan inovasi pertanian sudah sangat mendukung.

Tim Redaksi

Penanggung jawab
Kapusdatin

Redaktur
Kepala Bagian Umum

Editor
Andry Polos, S.Kom
Aulia Azhar Abdurachman, S.Si
Dra. P. Hanny Muliany, MM
Hani Hanifah R, S. Kom

Fotografer
Iswadi
Sri Lestari, SE

Desain Grafis
Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat
Eli David, S.Sos, MM
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Marwati
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Musdino
Priatna Sari
Didik Pratama Saputra, S.Kom

Alamat Redaksi

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV
Pasar Minggu - Jakarta 12550
Telp : 021- 7805305, 7816384
Fax : 021 - 7822638
e-mail : newsletter@pertanian.go.id

"Mari kita buktikan Indonesia bisa swasembada pangan. Kita sudah memiliki teknologi digital, ada start up, begitupun sains dan riset lebih baik," beber SYL.

Maka SYL berharap semua elemen Kementan dalam menyatukan pikiran dalam memajukan sektor pertanian Indonesia, terutama dalam membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

"Hadirkan cara pandang kita yang satu bahwa kita hadir untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Kita sebagai bagian dari pelaku pembangunan pertanian bisa menjadi pahlawan untuk bangsa ini," pungkasnya.

Mentan SYL Pimpin Sidang Menteri Pertanian ASEAN, Pastikan Ketahanan Pangan Regional

Dhanang

Seiring dengan dinamika pembangunan regional dan imbas pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajak para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF), untuk melakukan upaya pemulihan dampak pandemi, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan dan gizi, sekaligus memastikan keamanan pangan di Asia Tenggara. " Saya mengajak kita untuk terus bekerja sama dalam upaya pemenuhan komitmen tersebut. Pemanfaatan hubungan dengan mitra kerjasama maupun mitra dialog lainnya perlu terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian komitmen, memastikan keamanan pangan di wilayah ASEAN," ungkap Mentan Syahrul saat memimpin sidang pelaksanaan Pertemuan ke-43 para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) secara virtual, di Ruang AWR Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (27/10).

Meskipun kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, Mentan Syahrul mengungkapkan bahwa berkat kerja keras masing-masing negara dalam mengatasi tantangan tersebut, berbagai Lembaga Internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global dan kawasan ASEAN mulai menunjukkan tren pemulihan. Dengan dukungan sistem pangan yang resilien, diharapkan perkiraan tren positif tersebut dapat terealisasi dengan cepat.

"Secara umum kita dapat melihat bahwa betapa besar kontribusi sektor pangan dan pertanian dalam upaya stabilisasi ekonomi di ASEAN. Sebagai bagian dari komitmen AMAF, meskipun kami mengalami kesulitan yang sama, namun kami yakin dapat menjamin ketahanan pangan dan mempersiapkan pangan bagi masyarakat di ASEAN, " ungkapnya.

Sejak pertemuan AMAF di Kamboja pada tahun lalu, Mentan Syahrul mencatat sejumlah perkembangan kerjasama yang dihasilkan oleh berbagai Kelompok Kerja Teknis di bawah AMAF.

Salah satunya adalah implementasi kerangka kerja ASEAN untuk mendukung para petani dan produsen skala kecil, koperasi, serta UMKM dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Harapannya produk ini mampu memenuhi tuntutan standar permintaan pasar dan berkompetisi di pasar global.

Lebih lanjut Mentan SYL mengungkapkan upaya bersama dalam mencapai target sasaran kerangka kerja komprehensif pemulihan dampak pandemi Covid-19 di wilayah ASEAN (ASEAN Comprehensive Recovery Framework/ACRF), perlu terus didorong melalui implementasi program-program yang telah disepakati oleh para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020.

Mentan menjelaskan Indonesia sendiri selama 2 tahun terakhir telah melakukan berbagai langkah untuk reformasi struktural besar, salah satunya melalui penerbitan UU Cipta Kerja tahun 2020 yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha dan iklim investasi.

Dalam pertemuan tersebut juga, Mentan Syahrul menyampaikan apresiasi bagi para pejabat senior dan seluruh kelompok kerja teknis AMAF atas capaian tersebut. “Saya berharap kita dapat terus bekerja sama secara optimal dalam semangat solidaritas ASEAN untuk menyelesaikan berbagai kegiatan sesuai target yang telah disepakati bersama, “ ungkap Mentan Syahrul

Sementara Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN on Economic Community (ASEC), Satvinder Singh yang hadir secara virtual juga mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir wilayah ASEAN telah mengalami masa pemulihan ekonomi dan perkembangan positif yang baik. Hal ini dapat dilihat dari target pertumbuhan positif GDP ASEAN sebesar 3,1 persen pada tahun 2021 dan 5 persen untuk tahun 2022.

“ Pertumbuhan GDP Asean sebesar 3,1 persen ini merupakan kabar baik bagi kita semua, saat ini ASEAN menjadi salah satu tujuan investasi yang sangat menarik, kita bisa melihat perkembangan saham global naik dari 11,9 persen di tahun 2019 menjadi 13, 7 persen di tahun 2020, “ ungkap Satvinder Singh. Satvinder Singh menambahkan bahwa pihaknya mencoba memastikan terciptanya implementasi yang efektif dari kerangka kerja untuk pemulihan ekonomi jangka panjang di wilayah ASEAN. Dan untuk pertama kali sektor pertanian dan sumber daya pangan masuk kedalam beberapa daftar esensial untuk mendorong pemulihan ekonomi.

“ Saat ini ekonomi sudah menuju kearah pemulihan maka saya ingin menekankan pentingnya memastikan pulihnya sektor pangan dengan cara memastikan rantai persedian yang baik, kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk bekerja menuju pertanian yang berkesinambungan, “ ujarnya.

Secara virtual dalam Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) ke-43, seluruh delegasi anggota menyampaikan

apresiasi kepada Menteri Pertanian Indonesia, Syahrul Yasin Limpo karena telah berhasil menjadi pimpinan sidang dan tuan rumah yang baik dan efisien.

“Atas nama Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Pertanian Indonesia atas undangan dan telah menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) ke-43, “ ungkap Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja, Veng Sakhon.

Cegah Seragan Digital, Kementan dan BSSN Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber

Yusri Ardi

Keamanan siber menjadi isu strategis di Indonesia, termasuk pada bidang pertanian. Hal ini yang mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membentuk Computer Security Incident Response Team (Kementan -CSIRT).

“Saya kira setiap Kementerian dan Lembaga memiliki alasan khusus dalam pembentukan tim ini, karena kita tidak bisa menghindari yang namanya digitalisasi, ataupun sarana komunikasi yang sifatnya digital dan berbasis komputer, itu yang menjadikan tim siber ini penting dan layak menjadi prioritas bagi keamanan negara dalam konteks setiap sektor agar bisa di fasilitasi” ungkap Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian saat peluncuran Kementan – CSIRT pada tanggal 12 Oktober 2021 Hotel Aston Priority Jakarta.

Kemajuan teknologi, serta dinamika lingkungan strategis akibat pandemi covid 19, turut mempengaruhi program dan kinerja sektor pertanian, Kasdi mengatakan perkembangan teknologi dan ruang siber telah menuntut para pelaku di sektor ini agar

mampu bertransformasi dan lebih tanggap terhadap perkembangan informasi dan komunikasi.

“Capaian dan kinerja pertanian selama ini menggambarkan bagaimana pentingnya keamanan data di sektor ini, kalau petani juga tidak diberikan informasi yang benar terhadap beberapa hal berkait dengan digital dan siber tentu mereka akan menjadi victim selamanya ditengah kemajuan informasi dan komunikasi yang terus berkembang” ungkap Kasdi.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (PURN) Hinsa Siburia mengatakan, saat ini BSSN tengah membangun kekuatan siber, salah satunya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia.

“Kami diamanatkan untuk membentuk 121 CSIRT selama tahun 2020-2024, Pada tahun 2021 ini, akan dibentuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) CSIRT yang tersebar di Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Tahun 2020, telah berhasil dibentuk sebanyak 15 (lima belas) CSIRT” ungkapnya.

Dalam menjalankan perannya, lanjut Hinsa Siburia, kemampuan SDM Kementan-CSIRT harus selalu ditingkatkan sebagai bekal pelaksanaan tugas sebagai anggota Kementan- CSIRT. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui program pelatihan, workshop, cybersecurity drill dan lainnya.

“Saya berharap Kementan-CSIRT dapat terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder, sehingga membentuk ruang siber Kementerian Pertanian yang aman dan kondusif, dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di ruang siber” tegasnya.

Sebagai informasi, CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional, dan CSIRT Sektoral pada sektor administrasi pemerintahan, energi dan sumber daya mineral, transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan, pertahanan, sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden, serta CSIRT Organisasi. CSIRT bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), CSIRT diharapkan dapat mendukung penerapan SPBE untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Mohon Kesediannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan
bit.ly/surveipusdatin

Kementan-Kejagung Kolaborasi Pastikan Bantuan Alsintan Termanfaatkan Genjot Produksi dan Kesejahteraan Petani

Dhanang

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang digelontorkan kepada petani untuk program Tahun Anggaran 2021. Pengawalan ini merupakan komitmen Kementan mendukung tugas Kejagung dalam menjalankan program pengamanan strategis nasional Tahun 2021 di sektor pertanian khususnya pengadaan alsintan dan juga merupakan komitmen Kementan untuk membangun mekanisasi pertanian yang benar-benar termanfaatkan sehingga pembangunan pertanian semakin maju dan modern dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, utamanya di masa pandemi covid 19.

"Jadi kami bersama Kejagung langsung on the spot ke lapangan hari ini dalam rangka memastikan program bantuan alsintan ini dalam pelaksanaannya betul-betul tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," tegas Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah saat bersama rombongan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional Kejagung yang dipimpin Kasubdit Pengairan, Perikanan dan Peternakan, Jamintel Kejagung, Rini Hartati guna memantau distribusi alsintan di Desa Saba, Kecamtan Blahbatuh, Gianyar, Selasa (26/10/2021)

Nur Alam menuturkan di tahun anggaran 2021 ini, Kementan mengalokasikan anggaran pengadaan alsintan untuk petani sebesar Rp 654 miliar lebih. Provinsi Bali sendiri mendapatkan total alokasi bantuan alsintan sebanyak 376 unit. Dengan rincian, traktor roda empat 12 unit, traktor roda dua 139 unit, rice transplanter 6 unit, pompa air 39 unit, handsprayer 122 unit dan cultivator 58 unit, sementara petani di Desa Saba sendiri menerima dua unit handtraktor roda 2.

Lebih lanjut Nur Alam menegaskan pihaknya memastikan bantuan alsintan yang masuk ke Pulau Dewata ini sudah berdasarkan penetapan calon petani calon lokasi (CPCL) berdasar permintaan dan kebutuhan petani.

Bahkan, alsintan ini pun dipastikan telah melalui proses quality control sehingga produk yang diterima petani tidak ada cacat atau kerusakan awal.

"Di bantuan alsintan ini juga sudah ada masa garansi dari penyedia. Jadi kalau misalnya dalam masa garansi ini terjadi kerusakan, maka penyedia wajib melakukan perbaikan dan itu gratis. Di modul yang kami berikan ada nomor kontak service center-nya. Ini harus dimanfaatkan," tegasnya.

Nur Alam menekankan mengelola alsintan ini bukanlah hal yang mudah. Namun dia optimis investasi yang dilakukan negara setiap tahunnya kepada petani dalam bentuk alsintan ini bisa bermanfaat sehingga hasilnya nyata dirasakan oleh masyarakat.

"Tapi kami meminta juga ketika tahun ini diberi 1, tahun depan bisa beli 1 juga dong secara swadayaa atau mandiri karena banyak petani juga yang butuh. Sehingga ke depannya petani di wilayah ini tidak perlu lagi sentuhan pemerintah (bantuan,- red) karena sudah bisa pengadaan sendiri," cetusnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sudah banyak petani yang mampu mengadakan unit alsintan secara mandiri. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa bantuan yang digelontorkan mampu menstimulasi petani untuk pengadaan sendiri.

"Pemerintah juga mengalokasikan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat,- red) untuk mendukung permodalan petani untuk pembelian alsintan. Jadi petani tidak hanya mendapat bantuan, tapi juga difasilitasi untuk mandiri dan mengembangkan pertaniannya lebih maju," jelasnya.

Terakhir,Nur Alam berpesan agar bantuan ini dimaksimalkan, dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Bantuan tersebut harus bisa digunakan oleh semua anggota, tidak boleh hanya pengurus saja sehingga manfaat mekanisasi yang digelontorkan pemerintah benar-benar mempercepat olah lahan, tanam, panen dan terjadi peningkatkan produksi serta efisiensi biaya usaha tani.

"Kami pantau betul alsintan kami di lapangan. Fungsional pengawal alsintan kami sudah sebar pastikan tidak ada lahan yang tidak tergarap padahal alat kami ada," tegasnya.

Updating Luas Baku Lahan Sawah Sebagai Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta

T. Heni & Victor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 270 juta penduduk, Kementerian Pertanian (Kementan) berkepentingan terhadap salah satu program yaitu pemetaan lahan pertanian atau khususnya lahan sawah berbasis spasial. Program ini sangat diperlukan untuk

mendeteki perubahan lahan baku sawah yang sangat dinamis, dimana data lahan baku sawah (LBS) yang dirilis oleh Kementerian ATR-BPN bisa berubah setiap tahunnya atau lahan sawah mengalami pengurangan maupun penambahan.

Sebagai Wali Data Pertanian, Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian berperan untuk membantu memverifikasi luas baku sawah dengan menginisiasi penggunaan aplikasi Arcgis Collector. Aplikasi berbasis android ini dapat menjadi satu pilihan aplikasi digitasi lahan pertanian/sawah yang user friendly sehingga dapat digunakan untuk membantu pengumpulan data lahan secara cepat dan mudah digunakan baik offline maupun online di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Bulan September 2021, tim Pusdatin berkunjung ke Kabupaten Purwakarta untuk berdiskusi terkait beberapa isu salah satunya adalah isu terkait alih fungsi lahan sawah. Pada kunjungan tersebut disamping diskusi terkait kegiatan updating data LBS yang saat ini dilaksanakan juga dilakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi lahan sawah yang disinyalir sudah mengalami alih fungsi.

Sementara hasil diskusi terkait kegiatan updating LBS didapatkan bahwa Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu dari 50 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia yang saat ini sedang melakukan verifikasi luas baku lahan sawah tahun 2021. Kegiatan tersebut masuk dalam program kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ditjen Saranan dan Prasarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian.

Hasil Sensus Penduduk menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta 1,54% (BPS, 2021) atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,33% (BPS, 2020). Dengan jumlah penduduk 997.869 jiwa (BPS, 2021), maka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta diperkirakan bertambah 15.367 jiwa per tahun.

Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian juga tidak terkendali. Laju alih fungsi lahan pertanian pada tingkat nasional bervariasi mulai 110.000 ha/tahun (Irawan, 2002), 25.000 ha/tahun (BPN, 2010), dan 96.500 ha/tahun (Mulyani et al., 2016). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor keterbatasan lahan yang pemanfaatannya digunakan untuk berbagai sektor. Secara umum, alih fungsi paling dominan adalah perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun seperti permukiman, jalan, perkantoran, dan industri.

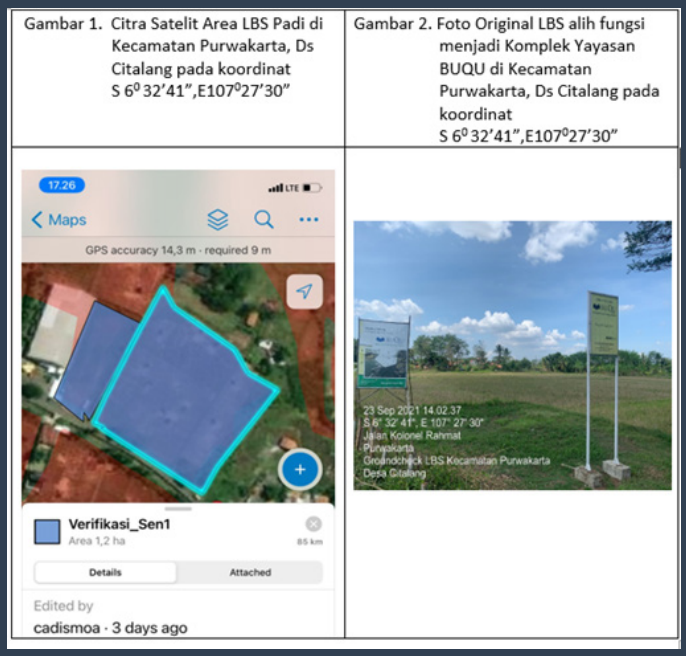

Gambar 1. Verifikasi LBS Kecamatan Purwakarta, Desa. Citalang Purwakarta

Perkembangan luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Purwakarta, mengalami peningkatan pada rentang tahun 2015-2019, yakni sebesar 1.540 ha atau rata-rata 385 ha/tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, luas baku lahan sawah LBS tahun 2019 mencakup 19.245 ha, namun alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2019 hingga 2021 masih berpotensi terjadi di Kabupaten Purwakarta, meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi penambahan luas lahan sawah di beberapa lokasi.

Alih fungsi lahan pertanian yang mungkin terjadi di Kabupaten Purwakarta antara lain di lokasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II (Jati Asih-Sadang), pengembangan perumahan, ataupun pengembangan kawasan industri. Oleh sebab itu, perlu ada pembaruan (update) data dan informasi terkait data luas lahan baku sawah di Kabupaten Purwakarta.

Selain itu, urgensi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan (supply-demand) di masa depan. Upaya perlindungan lahan pertanian juga akan memperkuat ketahanan pangan di suatu wilayah.

Peta usulan LP2B hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan teknis dalam kebijakan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta.

Capaian output pekerjaan pada lingkup kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Dokumen Peta Lahan Baku Sawah terkoreksi yang telah dilengkapi atribut Indeks Pertanaman, Produktivitas serta kondisi status irigasi
2. Peta Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Rekomendasi Penetapan LP2B yang akan dituangkan dalam SK Bupati

Ruang lingkup kegiatan mencakup:

- Pengumpulan data sekunder (Lahan Baku Sawah, Batas Administrasi, peta-peta dasar, dan citra satelit)
- Proses edit Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2019 mengacu pada citra satelit (google earth dan SPOT 7 tahun 2019)
- Rekapitulasi lokasi ground-check berdasarkan hasil analisis spasial awal (desktop study)
- Pembuatan peta kerja ground-check per kecamatan (atau per desa) sesuai hasil penentuan lokasi ground-check
- Pengisian informasi awal pada blanko survei (per kecamatan) meliputi nama desa, nomor hamparan, luas bidang/poligon.

Berdasarkan SK Menteri ATR/BPN No. 686/SK.PG.03.03/XII/2019, total luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta mencakup 19.245 ha. Lahan sawah tersebut tersebar di seluruh

kecamatan dengan kategori luas terbanyak (1.500-2.000 ha) terdapat di tiga kecamatan atau mencapai 18% dari total luas baku sawah, yaitu Kecamatan Cibatu, Kecamatan Darangdan, dan Kecamatan Tegalwaru, berikutnya luasan berkisar 1.000-1.500 hektar yang mendominasi kecamatan di Kabupaten Purwakarta yaitu terdapat di 8 kecamatan atau mencapi 47% dari total luas lahan sawah.

Perubahan luas lahan sawah tahun 2019-2021 berdasarkan luas tahun 2019 yang semula seluas 19.245,2 ha, setelah dilakukan ground check di 17 kecamatan yang meliputi 132 titik di 73 batas wilayah administrasi desa/ kelurahan, menunjukan bahwa ada lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun sebanyak 184,6 hektar, tegalan 51,9 hektar, tumbuh air 31,1 hektar dan alih fungsi lainnya sebanyak 211,4 hektar. Hal yang sebailkya, terdapat tambahan hamparan sawah baru sebanyak 512 hektar yaitu berupa sawah tadah hujan, lahan sawah pasang surut bantaran waduk jatiluhur, dll.

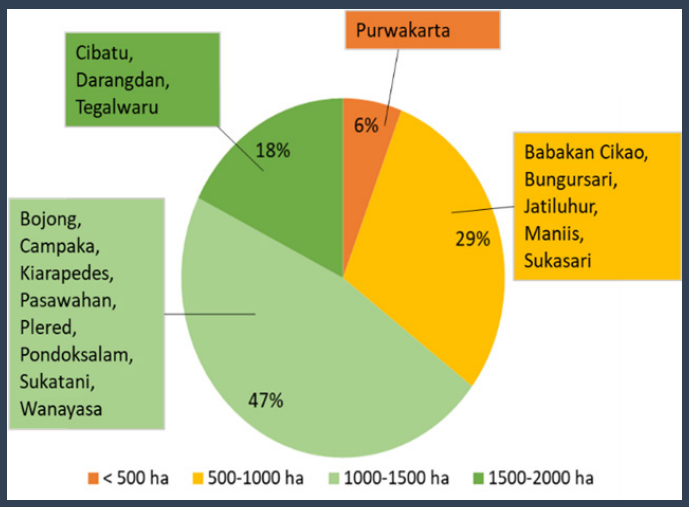

Gambar 2. Proporsi luas LBS tahun 2019 per kecamatan di Kabupaten Purwakarta

Dari hasil survai dapat disimpulkan secara umum bahwa 98% area LBS 2019 di Kabupaten Purwakarta tidak berubah atau tetap lahan sawah pada tahun 2021 seluas 19.279 ha.

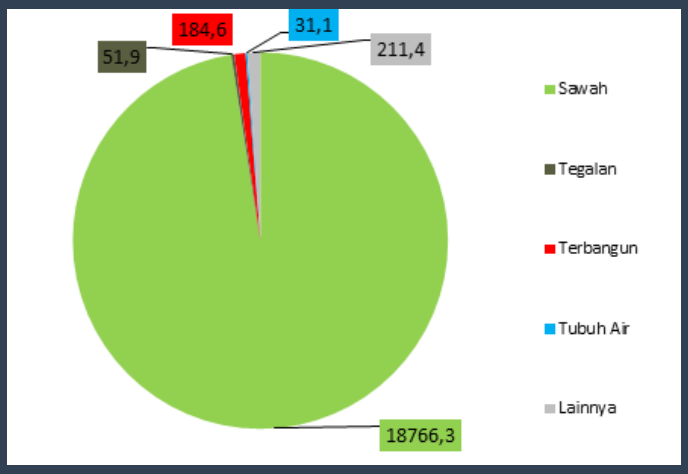

Gambar 3. Proporsi luas alih fungsi berdasarkan hasil ground check

Kegiatan lanjutan setelah melakukan updating LBS 2021 di Kabupaten Purwakarta adalah Menyusun draft LP2B yang akan dibahas dan disahkan oleh tim pokja yang selanjutnya membuat Rekomendasi Peta LP2B untuk ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota atau diintegrasikan penetapannya dalam Perda RT/RW Kabupaten/Kota dalaam bentuk SK Bupati tentang Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (T Heni A., Victor SB., Adi S.).

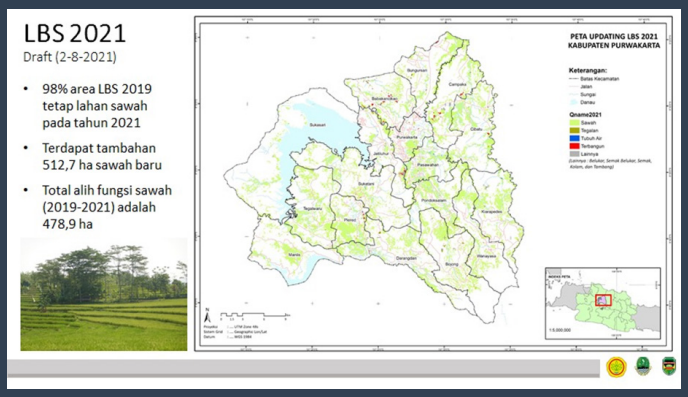

Gambar 4. Hasil Sementara Updating Luas Baku Sawah 2019 Kabupaten Purwakarta, Tahun 2021

Info Data Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP nasional Oktober 2021 sebesar 106,67 atau naik 0,93 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,05 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang sebesar 0,12 persen.
- Secara nasional, NTP Januari–Oktober 2021 sebesar 104,01 dengan nilai It sebesar 112,09 sedangkan Ib sebesar 107,77.
- Pada Oktober 2021, NTP Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan tertinggi (2,94 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Gorontalo mengalami penurunan terbesar (1,21 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.
- Pada Oktober 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,10 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Oktober 2021 sebesar 106,49 atau naik 0,86 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Inflasi

- Pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,66. Dari 90 kota IHK, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 2,06 persen dengan IHK sebesar 109,30 dan terendah terjadi di Banyuwangi dan Sumenep masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 104,64 dan 106,21. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,70 persen dengan IHK sebesar 107,98 dan terendah terjadi di Bengkulu sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,89.
- Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,33 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,02 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen.
- Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2021 sebesar 0,93 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 1,66 persen.
- Komponen inti pada Oktober 2021 mengalami inflasi sebesar 0,07 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Oktober) 2021 sebesar 1,23 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 1,33 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)